



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, masih terdapat 8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2022;
- b. Rancangan Peraturan Daerah yang belum diselesaikan antara lain Rancangan Peraturan Usul Prakarsa Komisi A, Komisi C, Komisi D dan Komisi E serta Usul Prakarsa Gubernur.
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, apabila pelaksanaannya belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah berikutnya berdasarkan kesepakatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Biro Hukum Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 64);

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- KETIGA** : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
 Pada Tanggal 12 Januari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Wakil Ketua,

ttd

QUATLY ABDULKADIR ALKATIRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JANUARI 2023

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PRIORITAS TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2023 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas Propemperda Tahun 2023 serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2023 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan pada Tanggal 24 November 2022 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang memprogramkan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Gubernur dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka.

Namun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 masih terdapat 8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah dalam tahap pembahasan. Dengan demikian sesuai dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2016

tentang Pembentukan Perda, bahwa apabila pelaksanaan Propemperda belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Badan Pembentukan Perda dan Biro Hukum Provinsi, sehubungan hal tersebut maka perlu dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, untuk itu perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2023

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketentraman serta penanganan konflik sosial di masyarakat di Jawa Tengah, yang notabnya sebagai dari daerah yang multi etnis. Atas dasar tersebut maka perlu Menyusun Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
2. Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan sektor pangan, salah satu upaya Jawa Tengah sudah Memiliki BUMD yang bergerak di Bidang pangan, untuk itu Dukungan Regulasi Terhadap Kewenangan Daerah dalam Mengimplementasikan kedaulatan pangan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 BUMD dan bekerjasama dengan 2 BUMN, merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk itu tata Kelola BUMD harus dilaksanakan secara baik dan terukur, untuk itu Jawa Tengah Perlu Menyusun Perda Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah.
4. Air Minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat, mengingat Jawa Tengah, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kekeringan, untuk menjaga ketersediaan Air Minum maka perlu

disusun Peraturan Daerah tentang Sistem Air Minum Regional di Provinsi Jawa Tengah.

5. Salah satu pilar berbangsa dan bernegara adalah kedaulatan dalam kebudayaan, Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang memiliki budaya yang menjadi warisan dunia, sehingga dalam melakukan perlindungan dan pengembangan budaya maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah.
6. Salah satu tujuan dalam penyusunan Produk Hukum Daerah adalah memberikan kepastian hukum. Dimana kepastian hukum salah satunya diwujudkan dalam ketertiban penyusunan lahirnya Undang-Undang 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, sehingga Perlu di susun Peraturan Daerah tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Salah satu pilar kebangsaan adalah pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu dalam rangka membentengi generasi muda dari kelunturan nilai-nilai kebangsaan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
8. Lahirnya Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamantkan bahwa paling lambat tanggal 5 Januari 2024 Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan. Untuk itu maka perlu di susun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disusun di Jawa Tengah.
9. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata ruang di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan peruntukannya, maka Perlu penyusunan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043.
10. Dalam rangka pengembangan industri Di Jawa Tengah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, untuk itu maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.
11. Perlunya pengendalian terhadap penyiaran dan pemberitaan serta dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

penyiaran, maka diperlukan regulasi terkait Penyelenggaraan Penyiaran.

12. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan pengaturan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, perlu dibuat Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.
14. Lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dibutuhkan kepastian hukum terhadap ketenagakerjaan, sehingga dibutuhkan regulasi terkait Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
15. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, maka diperlukan sebuah regulasi terkait Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah.
16. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu amanatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat 30 tahun.
17. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
18. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

C. DAFTAR PERUBAHAN PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2023

Berdasarkan arah dan kebijakan Perubahan Propemperda 2023, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Perubahan Propemperda Raperda Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 18 (Delapan Belas) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

**DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PRIORITAS TAHUN 2023**

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
1.	Penanganan Konflik Sosial	DPRD
2.	Kedaulatan Pangan	DPRD
3.	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah	DPRD
4.	Sistem Air Minum Regional	DPRD
5.	Pemajuan Kebudayaan	DPRD
6.	Pembentukan Produk Hukum Daerah	DPRD
7.	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	DPRD
8.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	GUBERNUR
9.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043	GUBERNUR
10.	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037	GUBERNUR
11.	Penyelenggaraan Penyiaran	DPRD LANJUTAN
12.	Pengelolaan Keuangan Daerah	DPRD LANJUTAN
13.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah	DPRD LANJUTAN
14.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	DPRD LANJUTAN
15.	Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR LANJUTAN
16.	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	GUBERNUR LANJUTAN
17.	Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	GUBERNUR LANJUTAN
18.	Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah.	GUBERNUR LANJUTAN

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
3.	APBD Tahun Anggaran 2024

D. PENUTUP

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2023 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2023 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah tahun 2023. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada tahun 2023 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

QUATLY ABDULKADIR ALKATIRI

**PENJELASAN PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAİ		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peraturan Daerah	Penanganan Konflik Sosial	Pencegahan konflik sosial; Penghentian konflik sosial; Pemulihan pasca konflik sosial; Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial; Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat;	Baru		a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial a. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial		a. Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketenteraman serta penanganan konflik sosial di masyarakat di Jawa Tengah; b. Jawa Tengah sebagai daerah yang multi etnis. c. Amanat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan	- Kesbangpol - Dinas Sosial - Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<p>Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu diatur mengenai penanganan konflik sosial melalui Peraturan Daerah</p> <p>d. Berdasarkan point a, b dan c maka perlu Menyusun peraturan daerah tentang penanganan konflik sosial.</p>			
2.	Peraturan Daerah	Kedaulatan Pangan		Baru		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan		<p>a. ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketahanan pangan - Biro Hukum 	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah		serta tersebar merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. c. Atas dasar tersebut maka perlu diatur dalam peraturan daerah tentang ketahanan pangan.			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Peraturan Daerah	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; Kebijakan Umum Mengenai BUMD; Standar Operasional Prosedur BUMD; Organ BUMD; Permodalan; Dewan Pengawas/Dewan Komisaris; Direksi; Pegawai BUMD; Penugasan Kepada BUMD; Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD; Teknis Pelaksanaan RUPS / Rapat	Baru		PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah		<p>a. pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>b. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah Jawa Tengah, maka diperlukan pengaturan pedoman penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>c. mendasarkan pada ketentuan</p>	- Biro Perekonomian - Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tahunan / Persetujuan Pemegang Saham / Persetujuan KPM; Penggunaan Laba; Aktiva Tetap dan Inventaris; Struktur Organisasi dan Tata Kerja; Kerjasama; Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Pembinaan Dan Pengawasan.					Pasal 92 dan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. d. Berdasarkan point a, b, c maka perlu Menyusun perda tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah			
4.	Peraturan Daerah	Sumber Air Minum Regional		Baru		Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber		a. mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah perlu menjamin pengelolaan air	- Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Daya Air		<p>minum dilakukan sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat.</p> <p>b. kebutuhan akan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan, maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Jawa Tengah.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa salah</p>	- Pusdataru		

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<p>satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menetapkan kebijakan dan strategi.</p> <p>d. Atas point a, b dan c maka perlu Menyusun perda tentang sumber air minum regional</p>			
5.	Peraturan Daerah	Pemajuan Kebudayaan		Baru		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan		<p>a. unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan Negara harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Biro Hukum - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<p>b. budaya masyarakat Jawa Tengah merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Jawa Tengah , yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan.</p> <p>c. Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor</p>			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan Kebudayaan			
								d. Berdasarkan point a, b dan c maka perlu menyusun peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan.			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Peraturan Daerah	Pembentukan Produk hukum Daerah	Bentuk Produk Hukum Daerah; perencanaan; penyusunan Produk Hukum Daerah pembahasan Produk Hukum Daerah; fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi; nomor register; penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi; penyebarluasan; tata naskah dan teknik penyusunan; partisipasi	Baru		a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta		a. Produk Hukum Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. bahwa dalam rangka tertib pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan	- Biro Hukum, - Bapemp erda	2023	Mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			masyarakat; Analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah; materi muatan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah; pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; koordinasi, jejaring kerja,			Kerja; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah		mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar; c. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan produk hukum daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dan			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kemitraan dan kerjasama pembentukan Produk Hukum Daerah.					perlu dicabut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.			
7.	Peraturan Daerah	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; peran serta	baru		a. peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. b. Peraturan Menteri		a. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu Langkah untuk mengenalkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. b. Wawasan kebangsaan	Bapemperda Kebangpol Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Masyarakat; pembinaan dan pengawasan; dan kerja sama.			Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan		merupakan instrumen penting untuk membetengi masyarakat Jawa tengah dari Nilai nilai radikalisme dan premanisme, c. Atas dasar point a dan b maka perlu di susun perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan			
8.	Peraturan Daerah	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan	Baru		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah		Amanat dari Pasal 94 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan	BAPENDA	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi					menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah dan Perda tersebut ditetapkan paling lama 2 (dua) Tahun setelah pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.			
9.	Peraturan Daerah	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043	a. Tujuan, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah; b. Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah;	Baru		a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;		ada	- PUSDATA RU, - DINLUTKAN, - DLHK, - BAPPEDA	2023	a. Naskah Akademik disusun tahun 2022 (saat ini proses penyusunan); b. Menggabungkan muatan substansi Rencana Tata Ruang

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>c. Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>d. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>e. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.</p>			<p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p>					<p>Matra Laut (Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perairan Dan Pulau-Pulau Kecil) dan matra darat (Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah) ke</p>

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						e. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten					dalam 1 (satu) Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						, Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang.					
10.	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037	Pembangunan Industri Jawa Tengah		Perubahan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.		a. Rekomendasi LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021 DPRD Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan perlunya melakukan revisi terhadap Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan banyak regulasi baru, dan banyaknya daerah Jawa Tengah yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).	- DPMPTSP; - Dinlutkan; - Dinakkeswan; - Dinas ESDM, - Dishanpan; - Distanbun; - Disdik, - Bappeda, - Disnakertrans, - DLHK	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<p>b. Dalam Penyusunan Perda RPIP Jateng 2017-2037 belum sepenuhnya memasukkan regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Terbitnya Permendagri 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan</p>			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<p>Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan proyeksi dalam pencapaian Sasaran pelaksanaan pada RPIP Jateng khususnya pada Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Provinsi Jawa Tengah (2017 - 2037).</p>			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								e. Dinamika Pembangunan Industri di Jawa Tengah baik dari sisi dukungan Infrastruktur fisik pendukung sektor Industri, Pembangunan Kawasan-kawasan industri baru hingga beberapa proyek berstatus Proyek Strategi Nasional (PSN) yang pasti akan merubah arah pembangunan dan sasaran kinerja Pembangunan Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah.			
11.	Perda	Penyelenggaraan Penyiaran	- Pengaturan terhadap pengawasan program	V		- Undang-Undang Nomor 32 Tahun	V		- Dinas Komunikasi dan Informa	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			siaran lokal dan berita. - Penguatan kelembagaan penyiaran yang ada di Jawa Tengah. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk sadar media			2002 tentang Penyiaran. - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.			si. - Biro hukum - BAPPE DA		
12.	Perda	Pengelolaan Keuangan Daerah	- Pengaturan terhadap mekanisme pengelolaan	V		- Undang-Undang 23 tahun 2014	V		-BPKAD -Biro Hukum -BAPPEDA	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			keuangan daerah. - Proses Penyusunan ,pembahasan dan penetapan APBD dan KUA PPAS - Proses pelaksanaan dna penataan usahaan keuangan daerah. - Proses pelaporan akuntansi keuangan daerah. - Pertanggung jawaban Anggaran Daerah. - Penyelesaian utang daerah dan pengelolaan			Tentang Pemerintah Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. - Permendagri 77 tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan keuangan Daerah.			-BAPEN-DA		

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	.STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kekayaan daerah. - Proses penyelesaian kerugian keuangan daerah								
13.	Perda	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah	- Perlunya perubahan Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan regulasi dan perkembangan		V	1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja 3. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-		V	- Dinas LHK - Dinas PUSDA TARU - Biro Hukum - BAPPE DA - PD terkait lainnya	2023	-

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			an zaman. Tantangan dan kondisi terkini dalam pengendalian pencemaran air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah juga semakin kompleks.			kungan Hidup					
14.	Perda	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Ketenagakerjaan - Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja - Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja - Hubungan 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Per- 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi - Biro Hukum - BAPPEDA 	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Pengupahan - Perlindungan Tenaga Kerja - Pembinaan Pengawasan - Kerjasama - Peran Serta Masyarakat			selisihan Hubungan Industrial - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pe-lindungan Pekerja Migran Indonesia - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						tentang Cipta Kerja					
15.	Perda	Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah	Pembinaan dan Pengembangan Pesantren	V		- Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren	V		- Biro Kesra - Biro Hukum	2023	
16.	Perda	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Berdasarkan UU 32/2009, Memuat rencana 30 tahun tentang : a. Pemanfaatan dan/atau	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-	V		- DLHK - DISPERAKIM; - Dinas PUSDATARU; - Dinas PU Bina	2023	-

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>pencadangan Sumber Daya Alam;</p> <p>b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;</p> <p>c. Pengendalian, pemantauan dan penggunaan serta pelestarian sumber daya alam;</p> <p>d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.</p>			<p>Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>3. Surat Edaran Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi</p>			<p>Marga Cipta Karya;</p> <p>- BAPPE-DA;</p> <p>- Biro ISDA;</p> <p>- Biro Hukum;</p> <p>- PD terkait lainnya.</p>		

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dan Kabupaten/Kota.					
17.	Perda	Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	1. Perubahan bentuk hukum menjadi PERSERO-DA; 2. Perubahan Modal dasar; Bidang usaha	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.	V	-	- Biro Perekonomian SETDA - BPKAD; - BPPD; - Biro Hukum; - PT SPJT; - PD terkait lainnya.	2021	-
18.	Perda	Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjaminan	a. Perubahan bentuk hukum menjadi	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang	V	-	- Biro Perekonomian	2023	-

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kredit Daerah Jawa Tengah	PERSEROD A; b. Perubahan Modal Dasar; Bidang Usaha.			Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD			SETDA - BPKAD; - BPPD; - Biro Hukum; - PT Jamrida Jateng; - PD terkait lainnya.		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Wakil Ketua,

ttd

QUATLY ABDULKADIR ALKATIRI